

Strategi Pemberdayaan Ekonomi Melalui Program Amal Usaha Muhammadiyah Pada Perdesaan Di Sumbawa Barat

Ibrahim

¹, Universitas Muhammadiyah Mataram, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 1 Mataram-NTB, Ibrahimali.geo@gmail.com

Received: 30 November, 2019; Accepted: 17 Desember, 2019; Published: 20 Desember, 2019

Abstrak

Tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) pada Perdesaan di Sumbawa Barat masih rendah. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pemberdayaan ekonomi melalui program amal usaha muhammadiyah pada perdesaan di Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan pada perdesaan Sekitar Amal Usaha Muhammadiyah Kabupaten Sumbawa Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi, Analisis data menggunakan reduksi, display, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan ekonomi amal usaha muhammadiyah adalah belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana strategis amal usaha muhammadiyah. Pelaksanaan program masih belum maksimal, karena pengurus masih fokus dalam penyelesaian konflik ditingkat internal. Diperlukan adanya kesadaran dari semua pengurus wilayah sampai tingkat ranting di Kabupaten Sumbawa Barat untuk duduk bersama, sehingga perseolan bisa diselesaikan secara lebih bijak dan dapat mengembangkan amal usaha lebih baik di masa dating.

Kata Kunci: Pemberdayaan; Ekonomi; Muhammadiyah; Dan Konflik

Abstract

The level of welfare of the community around the Muhammadiyah Charitable Enterprises (AUM) in Rural Areas in West Sumbawa is still low. The purpose of this study is to analyze the economic empowerment strategy through the Muhammadiyah business charity program in rural areas in West Sumbawa. This research uses a descriptive qualitative approach. Data was collected in rural areas around Muhammadiyah Charitable Enterprises in West Sumbawa Regency. Data collection techniques using interviews, documentation, and observation, data analysis using reduction, display, verification and conclusions. The results of this study indicate that the economic empowerment strategy of Muhammadiyah business charity is not yet implemented according to the strategic plan of Muhammadiyah business charity. Program implementation is still not optimal, because the management is still focused on resolving conflicts at the internal level.

There is a need for awareness from all regional administrators up to the level of branches in West Sumbawa Regency to sit together, so that the problems can be resolved more wisely and can develop charity businesses better in the future.

Keywords: Empowerment; Economics; Muhammadiyah; And conflict

PENDAHULUAN

Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Keberadaan UU Desa merupakan instrumen hukum untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan kemandirian Desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan UU desa, masih banyak memiliki keaslian dan belum banyak berubah. Menurut Setyobakti (2017) menjelaskan bahwa desa dengan kategori sub urban, sehingga sifat masyarakatnya menyatu, tidak terpisah secara geografis. desa dekat dengan pusat pelayanan masyarakat termasuk yang dibangun oleh desa. Sarana dan prasarana desa khususnya terkait dengan pelayanan dasar telah terpenuhi, kekurangan hanya hanya perlu optimalisasi pemanfaatan. Sedangkan potensi yang menunjang adalah ketersediaan SDM, Pemerintah desa yang pro aktif, kearifan lokal yang sudah berjalan seperti pengelolaan sampah, kelembagaan ekonomi desa berupa Bumdesa yang sudah berjalan.

Perkembangan zaman terhadap keberadaan desa semakin hari semakin banyak berubah. Namun banyak juga yang belum berubah, karena masih rendahnya pemahaman dalam pelaksanaan pembangunan desa. Menurut Warouw (2015) menjelaskan bahwa Faktor-dalam proses pembangunan desa diantaranya: 1) mindset atau mentalitas dari para birokrasi yang belum berubah dari segi pelayanan; 2) sumber daya manusia yang terbatas; 3) tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah; 4) kurangnya partisipasi masyarakat; 5) sumber daya alam yang tidak memadai; 6) lokasi daerah; 7) kebudayaan daerah yang masih kuat. Kemungkinan

besar faktor-faktor ini yang menghambat proses perencanaan pembangunan di era otonomi saat ini.

Hadirnya Muhammadiyah sebagai lembaga social masyarakat, mampu melakukan terobosan dalam meningkatkan pembangunan desa dan masyarakat. Muhammadiyah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur-baur dengan kebiasaan di daerah tertentu dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

Berbagai langka dalam mendukung pembangunan sampai ditingkat desa (ranting). Berdasarkan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting atau LPCR (2019) menjelaskan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-45 pada 2005 di Malang Jawa Timur telah menetapkan revitalisasi Cabang dan Ranting sebagai salah satu prioritas Program Konsolidasi Organisasi. Komitmen besar tersebut kemudian dilanjutkan pada Muktamar ke-46 pada 2010 di Yogyakarta. Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan melakukan pengembangan Cabang dan Ranting secara kuantitatif— terbentuknya PCM di 70% jumlah kecamatan, dan terbentuknya PRM di 40% jumlah desa—dan juga secara kualitatif dengan menghidupkan kepengurusan Cabang dan Ranting yang mati, serta mengaktifkan Cabang dan Ranting yang belum aktif.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam Muktamar ke-46 mengamanatkan pembentukan Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (LPCR), meskipun sesungguhnya tugas pembinaan Cabang dan Ranting adalah tugas yang melekat pada fungsi Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah. Lembaga ini dalam SK PP No. 170/2010 tentang Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan, Pimpinan Pusat

Muhammadiyah bahkan mewajibkan dibentuknya LPCR di tingkat Wilayah dan Daerah.

Perlu ditegaskan bahwa LPCR adalah lembaga fasilitator yang bertugas melakukan pengondisian bagi pengembangan Cabang dan Ranting. LPCR tidak ditugasi untuk menghadirkan bidang kegiatan baru, melainkan membantu mewujudkan program-program yang sudah ada. Hubungan LPCR dengan Majelis dan Lembaga lain ibarat ‘katalisator’ dalam reaksi kimia atau ‘platform’ dalam program komputer: tidak memiliki tugas tersendiri, melainkan membantu elemen atau unit lain dapat menjalankan fungsinya dengan lebih maksimal.

Keberadaan LPCR ditingkat desa akan mampu memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Namun pada kenyataan tingkat kemiskinan masih tinggi di kabupaten dengan motto “ Bariri Lema Bariri”. Kondisi ini diperkuat dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun ke tahun penduduk miskin di Sumbawa Barat masih cukup tinggi. Berikut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumbawa Barat di rincikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Jumlah Penduduk Dan Persentase Miskin Kabupaten Sumbawa Barat

Uraian	Jumlah	Persentase
	Penduduk Miskin	Penduduk Miskin
(Tahun)	(Orang)	(%)
2012	21724	17,61
2013	21710	17,1
2014	22040	16,87
2015	22500	16,97
2016	22470	16,5
2017	22330	15,96

Sumber : BPS Kabupaten Sumbawa Barat, 2019

Dengan masih tingginya jumlah penduduk miskin yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat kehadiran Amal Usaha Muhammadiyah di tingkat ranting dan Cabang akan mampu memberikan alternatif dalam meningkat perekonomian masyarakat.

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar amal usaha muhamadiyah melalui bidang Program Wakaf, ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah), dan Pemberdayaan Ekonomi. Berbagai kebijakan Rencana Strategis adalah

terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat bawah melalui berbagai program yang dikembangkan Muhammadiyah.

Guna mendukung rencana strategis amal usaha muhammadiyah melalui program nasional adalah: 1) Menciptakan cetak biru (*blue print*) pengembangan ekonomi sebagai usaha untuk mengevaluasi dan merancang program pemberdayaan ekonomi ummat yang efektif. 2) Mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang didasarkan atas kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandirian ekonomi ummat. 3) Menegaskan keberpihakan Muhammadiyah terhadap usaha-usaha ekonomi dalam membangun kekuatan masyarakat kecil (akar rumput) yang dhu'afa dan musatdh'afin melalui kegiatan-kegiatan ekonomi alternatif. 4) Peningkatan pengelolaan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) dan akuntabilitasnya sehingga menjadi penyangga kekuatan gerakan pemberdayaan umat. 5) Mengupayakan terlaksananya ekonomi syariah yang lebih kuat dan terorganisasi dengan tersistem. 6) Peningkatan mutu pengelolaan wakaf dan perkuasan gerakan sertifikasi tanah-tanah wakaf di lingkungan Persyarikatan. 7) Pengembangan bentuk wakaf dalam bentuk wakaf tunai dan wakaf produktif

Berdasarkan permasalahan diatas penelitian ini memiliki tujuan adalah untuk menganalisis strategi pemberdayaan ekonomi melalui program amal usaha muhammadiyah pada perdesaan di Sumbawa Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan pada Desa seloto Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat. Pemilihan lokasi ini karena sebagai basis mAmal Uasaha Muhammadiyah di Kabupaten Sumbawa Barat.

Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara secara langsung dengan Pengurus Muhammadiyah ditingkat Cabang dan Ranting. Data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur-literatur seperti peraturan, buku, jurnal maupun artikel ilmiah yang terkait dengan program ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data menggunakan reduksi, display, verifikasi dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kerangka Kebijakan Program Muhammadiyah Jangka Panjang (Visi Muhammadiyah 2025) menjelaskan bahwa rencana strategisnya adalah mengembangkan dan memperluas kekuatan basis gerakan muhammadiyah yang terletak pada pusat “penolong kesengsaraan oemoem“ sehingga menjadi tenda besar bagi pelayanan dan keberpihakan sosial muhammadiyah secara terpadu dan lebih luas.

Secara umum garis besar programnya adalah : 1) Mendorong pelayanan terpadu bidang kesehatan yang menekankan pada kesehatan fisik, jiwa, iman, hukum dan social, 2) Mengembangkan konsep jalinan dan keterpaduan antara pelayanan sosial kesehatan Muhammadiyah dengan masyarakat dalam rangka mengembangkan misi Islam dan Muhammadiyah. 3) Membangun jaringan pelayanan sosial dan kesehatan Muhammadiyah yang mendorong bagi terciptanya daya dukung kekuatan pelayanan yang kuat, strategis dan cepat kepada masyarakat akar rumput. 4) Membuat dan mengembangkan pusat penelitian, pengembangan, data, informasi dan *crisis center* kesejahteraan masyarakat sebagai peta dasar dan tindakan strategis dalam memberikan pelayanan sosial Muhammadiyah di masyarakat.

5) Menghidupkan suasana ke-Islaman dan dakwah dalam setiap memberikan pelayanan kepada masyarakat. 6) Membuat prioritas penanganan masalah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat. 7) Mengembangkan alternatif-alternatif baru program pengembangan masyarakat untuk berbagai level dan jenis kelompok masyarakat. 8) Mengintegrasikan kerja persyarikatan dan amal usaha dalam program pengembangan masyarakat. 9) Mendorong, mengembangkan, dan mengoptimalkan terus menerus kekuatan Muhammadiyah sebagai elemen pemberantasan serta penyalahgunaan NAPZA. 10) Meningkatkan dan memperluas jangkauan program

pemberdayaan masyarakat di lingkungan komunitas petani, buruh, nelayan, dan mereka yang mengalami marginalisasi sosial di perkotaan maupun pedesaan.

Memperhatikan kebijakan program Muhammadiyah jangka panjang sesuai dengan visi Muhammadiyah 2025 berbagai strategi yang dikembangkan pada tingkat pengurus pusat sampai ranting guna mengembangkan dan memperluas kekuatan basis gerakan Muhammadiyah. Implementasi program sampai tingkat ranting memiliki strategi yang beragam. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan RSD (Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Al Manar) pada tanggal 14 Juni 2019 menjelaskan bahwa pada tingkat ranting Amal Usaha Muhammadiyah yang dikelolanya memiliki banyak program dalam rangka mengembangkan amal usaha. Beberapa amal usaha dilakukan bidang pendidikan RA, MI, MTs dan MA. Selain amal usaha bidang pendidikan tersebut juga diadakan kajian khusus masyarakat sekitar amal usaha dan penerimaan infaq sedekah dari masyarakat setelah melakukan panen.

Keberadaan Muhammadiyah di tingkat ranting akan mampu mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Menurut Purba dan Ponirin (2013) menjelaskan bahwa organisasi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam telah mampu memberikan pengaruh yang cukup besar bagi dunia organisasi pergerakan nasional. Sebagai organisasi, Organisasi Muhammadiyah di beberapa cabang mempunyai visi dan misi, yaitu “Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan AsSunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqamah dan aktif dalam melaksanakan Da’wah Islam Amar Ma’ruf Nahi Munkar di segala bidang menjadi rahmatan lil alamin bagi umat, bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenarnya dalam kehidupan dunia ini” dan misinya adalah Menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah SWT, yang dibawa oleh para Rasul Allah yang disyariatkan sejak Nabi Nuh a.s. hingga Nabi Muhammad SAW; Memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi; Menyebarkan luaskan agama Islam yang bersumber kepada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia dan Sunnah Rasul;

Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat.

Dibalik bidang pendidikan Amal usaha Muhammadiyah juga memiliki tanggung jawab terhadap keberdayaan masyarakat sekitar. Implementasi program pemberdayaan ekonomi melalui program amal usaha Muhammadiyah masih belum memiliki program secara detail ditingkat cabang dan ranting. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan RHM (tokoh masyarakat Sekitar amal Usaha Muhammadiyah) pada tanggal 10 November 2019 menjelaskan bahwa keberadaan Muhammadiyah di Kabupaten Sumbawa Barat masih belum dapat melaksanakan program pemberdayaan karena masih terkendala konflik di internal pengurus. Kondisi ini diperkuat dari wawancara mendalam dengan LKMN (Pengurus Wilayah Muhammadiyah Nusa Tenggara Barat) pada tanggal 13 November 2019 menjelaskan bahwa keberadaan pengurus Muhammadiyah kabupaten Sumbawa Barat masih dalam penyelesaian, namun sampai saat ini belum ada titik temu. Lebih lanjut LKMN sudah melakukan beberapa kali pertemuan dengan pengurus namun masih tidak ada juga penyelesaian. Program pemberdayaan masyarakat yang telah ditetapkan sesuai kebijakan PP Muhammadiyah sebagai bagian dari visi jangka panjang di tahun 2025 tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian Setiawan (2018) menjelaskan bahwa mengenai perbedaan yang mendasar dalam kajian di atas secara spesifik sebagai berikut; pertama, Penelitian dengan pembahasan tentang kontribusi Muhammadiyah masih bersifat general dan belum menyentuh pembahasan amal usaha Muhammadiyah di tingkat kepengurusan ranting. Kedua, penelitian masih bersifat makro dalam penelitiannya, karena masih menggabungkan beberapa amal usaha selain bidang pendidikan. Ketiga, bahwa pimpinan ranting lebih diposisikan sebagai pengurus yang menangani anggota dan umat di regionalnya lebih menekankan pada pemberdayaan keagamaan. Keberadaan amal usaha belum mampu memberikan pemberdayaan pada masyarakat sekitar serta diperlukan adanya terobosan baru dalam mengembangkan amal usaha berbasis kearifan local.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat sekitar amal usaha muhammadiyah di Kabupaten Sumbawa Barat masih jauh dari yang diharapkan sesuai dengan rencana strategis amal usaha muhammadiyah. Pelaksanaan program masih belum maksimal, karena pengurus masih fokus dalam penyelesaian konflik ditingkat internal. Diperlukan adanya kesadaran dari semua pengurus wilayah sampai tingkat ranting di Kabupaten Sumbawa Barat untuk duduk bersama, sehingga perseolan bisa diselesaikan secara lebih bijak dan dapat mengembangkan amal usaha lebih baik di masa dating.

DAFTAR RUJUKAN

- Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting (2019), Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting, diakses <http://lpcr.muhammadiyah.or.id/> pada tanggal 1 November 2019
- Permata AN (2012),”Pengembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah” Makalah Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Satu Abad Muhammadiyah di UAD Yogyakarta
- Purba Isma Asmaria dan Ponirin, 2013, Perkembangan Amal Usaha Organisasi Muhammadiyah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 1 (2) (2013): 101-111
- Setiawan Bendri, 2018, Kontribusi Pimpinan Ranting Muhammadiyah Dalam Mengelola Amal Usaha Pendidikan Di Kawasan Bangunjiwo Barat Periode 2010 – 2016, Skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Setyobakti Moh. Hudi, (2017), Identifikasi Masalah Dan Potensi Desa Berbasis Indek Desa Membangun (Idm) Di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang, Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Wiga Vol. 7, Maret 2017, Hal 1 – 14
- Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Warouw, Mareine Ricky Leonardusrengkung, Paulus Adrian Pangemanan (2015), Kajian Faktor-Faktor Dalam Proses Pembangunan Desa Di Era Otonomi Daerah Di Kecamatan Sinonsayang, Ase Vol. 11 No. 2a, Jul I2015: 13-20